

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan dengan mengacu pada hipotesa yang peneliti tentukan sebelumnya, yaitu sebagai berikut: *pertama*, Kausalitas kebijakan berupa pengaruh variable standardisasi terhadap variable daya saing serta pengaruhnya pada kesejahteraan ekonomi rakyat adalah sifat teoritis yang menjadi dasar penerapan kebijakan standardisasi ini. Akan tetapi adalah benar bahwa hal ini terlalu prematur atau terlalu dini jika indikatornya melihat pada kemampuan perusahaan kecil dan menengah dengan kondisi infrastruktur yang rendah untuk mengikuti standar pasar internasional. Sebuah kebijakan semestinya tidak hanya kuat dalam melahirkan aturan perundang-undangan, sekalipun ini juga sangat penting, namun juga harus mengukur kemampuan masyarakat sebagai pihak yang berdampak langsung atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Namun yang terjadi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor di Indonesia terkesan hanya memfasilitasi kebutuhan pasar internasional namun tidak diikuti dengan pendampingan dan pemberian bantuan yang nyata bagi pelaku usaha untuk dapat ikut merasakan manfaat yang didapat dari kebijakan tersebut.

Analisis dengan pendekatan konstruktivisme cukup memberi pengampunan bagi pemerintah Indonesia atas langkahnya yang dianggap terlalu dini dalam meratifikasi kebijakan standardisasi mutu produk ekspor. Dunia internasional saat ini seolah sedang dibangun menuju ukuran atau standar norma tertentu di segala sektor, utamanya disektor politik dan ekonomi, yang didorong kepada seluruh aktor internasional, baik aktor negara (*public*) maupun aktor swasta (*private*). Situasi ini yang kemudian tidak bisa dihindari oleh pemerintah Indonesia sehingga dengan modal keyakinan dan strategi-strategi ekonomi yang sebenarnya disandarkan pada peran serta aktor ekonomi asing maka pemerintah Indonesia dengan yakin menyepakati kebijakan ekspor tersebut.

Kondisi berikutnya yang muncul akibat kebijakan standarisasi yang seolah dipaksakan untuk diintegrasikan dalam sistem standar nasional, terutama dalam aktifitas ekspor adalah munculnya ketergantungan kepada negara industri maju. Dua klasifikasi ketergantungan yang muncul secara nyata adalah:

a) Ketergantungan Industri Keuangan

Ketergantungan Industri Keuangan ditandai dengan adanya suatu dominasi modal besar di negara maju yang ekspansinya ke negara berkembang dan negara miskin dilakukan dengan investasi dalam produksi bahan mentah primer untuk tujuan konsumsi di negara tujuan investasi modal. Struktur produksi di negara berkembang tumbuh untuk melayani ekspor komoditi sehingga terjadilah apa yang disebut oleh masyarakat Amerika Latin "*desarollo hacia afuera*" atau pembangunan yang berorientasi ke luar negeri. Ekonomi dalam negeri tidak mampu menciptakan pasar atau landasan permintaan efektif yang kokoh untuk menopang pembangunan industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu: 1) Sebagian besar pendapatan nasional yang diperoleh melalui ekspor digunakan untuk membeli input dari luar negeri, dikirimkan ke luar negeri sebagai keuntungan dan digunakan untuk mengimpor barang konsumsi mewah sehingga yang tinggal untuk reinvestasi relatif sangat kecil, 2) Kaum pekerja berada dalam proses super-eksploitatif sehingga konsumsi mereka relatif terbatas dan tidak dapat menimbulkan permintaan efektif yang berarti.

Situasi ini menimbulkan ketergantungan perdagangan internasional negara berkembang pada modal asing karena modal domestik tidak mampu menjawab kebutuhan industrialisasi dengan sendirinya. Begitu pula ketika standarisasi mutu produk ekspor diratifikasi dalam kondisi infrastruktur industri di Indonesia yang masih rendah semakin membuka peluang bagi masuknya modal asing yang diarahkan untuk menutupi keteringgalan infrastruktur industri. Dari sini maka dapat dibaca prioritas diratifikasinya kebijakan internasional oleh pemerintah Indonesia cenderung lebih ditujukan untuk membuka investasi dan modal asing daripada membangun perekonomian berbasis kerakyatan.

b) Ketergantungan Teknologi Industri

Ketergantungan Teknologi Industri adalah konsekuensi dari operasi perusahaan multinasional yang mulai melakukan investasi di sektor industri dinegara berkembang. Hampir seluruh industri baru di negara berkembang secara teknis produksinya tergantung pada luar negeri. Investasi baru di negara berkembang seluruhnya ditentukan oleh tersedianya devisa untuk membiayai mesin dan bahan mentah yang tidak diproses di dalam negeri. Pembelian mesin dan input lain yang diperlukan dari luar negeri oleh pihak di negara berkembang dibatasi oleh dua faktor, yaitu kemampuan sektor ekspor yang ada untuk menghasilkan devisa dan sistem monopoli hak paten yang selalu mengakibatkan produsen mesin atau afiliasinya cenderung untuk mengalihkan mesin tersebut sebagai penyertaan modal mereka dalam proyek investasi di negara berkembang dan selalu tidak bersedia menjual mesin sebagai komoditi biasa. Jika produksi di sektor ekspor dikuasai oleh pihak asing, maka di sini kembali timbul ketergantungan yang pada hakekatnya merupakan ketergantungan kolonial dalam bentuk baru dengan segala akibatnya di bidang ekonomi dan sosial politik.

Ketergantungan pada dua aspek diatas membuat banyak perusahaan kecil dan menengah yang gulung tikar karena tidak mendapatkan akses modal yang disediakan. Kebutuhan modal dan alih teknologi belum mampu dijawab oleh pemerintah Indonesia sehingga yang terjadi adalah ketertinggalan tingkat kontribusi perusahaan kecil dan menengah dalam ekspor. Kontribusi ekspor UKM Indonesia hanya 9,3 persen, kontras dengan UKM Thailand, Filipina, dan Malaysia yang mampu berkontribusi diatas 28,1 persen terhadap total ekspor. Bahkan kontribusi UKM Indonesia terhadap total ekspor masih tertinggal dibawah UKM Vietnam dengan kontribusi sebesar 16,8 persen

Kedua, disadari oleh pemerintah bahwa standardisasi hanya bisa diikuti oleh perusahaan besar. Terdapat kesan bahwa pemerintah sudah cukup puas dengan aktifitas ekspor Indonesia yang didominasi oleh perusahaan besar yang memiliki modal finansial memadai sehingga mampu menyediakan infrastruktur yang lebih modern dan pemanfaatan teknologi dalam proses

produksi. Hal ini sebenarnya dapat dipahami jika melihat pada keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah untuk mendukung dan mengangkat perusahaan kecil dan menengah untuk dapat terlibat lebih dalam pada aktifitas ekspor di Indonesia.

Rezim perdagangan Internasional membuat negara-negara berkembang terkoneksi dengan sistem ekonomi dunia yang kapitalis dan liberal, sehingga mereka menjadi negara-negara pinggiran dari negara-negara kapitalis. Liberalisme hanya akan menyebabkan terbentuknya dua jenis negara yaitu negara pusat dan negara pinggiran seperti mengaju pada istilah pada teori ketergantungan. Barang-barang industri dihasilkan oleh negara pusat, sedangkan hasil-hasil perikanan (dan pertanian) dihasilkan oleh negara pinggiran. Keduanya melakukan transaksi perdagangan yang seharusnya mencapai keuntungan di kedua belah pihak, namun dalam prakteknya keuntungan itu hanya dinikmati oleh negara maju. Dengan melakukan ekspor barang-barang ke negara pusat, maka pendapatan negara pinggiran semakin meningkat dan berakibat pada peningkatan pendapatan rakyat di negara pinggiran. Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan akan barang-barang mewah dari negara industri juga mengalami peningkatan, sehingga impor barang mewah di negara pinggiran meningkat. Peningkatan nilai tukar barang-barang primer dengan hasil komoditi perikanan dan pertanian, menyebabkan tidak berimbangnya neraca perdagangan dan menjadikannya defisit.

Negara industri juga sering melakukan proteksi atas komoditi yang mereka hasilkan, sehingga negara pinggiran sulit mengekspor hasil produksinya ke negara pusat. Penemuan teknologi baru juga mendorong sintesis bahan mentah industri, sehingga negara pusat tidak perlu mengimpor bahan bakar mentah dari negara pinggiran. Hal ini menyebabkan gerak ekonomi negara pinggiran menjadi terhenti. Disamping itu Negara pinggiran juga seolah dipaksa untuk menjadi negara penerima donor agar mampu menjawab tuntutan standar pasar internasional. Kewajiban membayar utang luar negeri dan perjuangan mengurangi kesenjangan standar proses produksi

komoditas ekspor ikut menambah pengeluaran neraca pembayaran. Inilah yang menimbulkan struktur ketergantungan yang menjadi penghambat utama bagi perkembangan pembangunan ekonomi di negara-negara pinggiran atau negara berkembang.

Dalam posisinya sebagai negara pinggiran¹, pelaku usaha atau produsen ekspor pada industri kecil dan menengah di Indonesia mengalami kondisi ketidakefektifan (distorsi) akibat berupaya mengikuti standar pasar internasional yang tinggi dengan kondisi sumber daya yang terbatas. Kemampuan pemerintah melakukan alih teknologi yang kembali lagi terkendala modal membuat minim peranannya dalam membantu industri kerakyatan menjawab tantangan standardisasi ekspor. Kompleksitas ini membuat kontribusi industri kerakyatan relatif masih rendah dan tertinggal dari negara-negara Asia Tenggara lainnya. Keseluruhan hal inilah yang menjadi penghambat peningkatan volume hasil perikanan Indonesia.

B. Saran

Dari penelitian ini dapat peneliti sampaikan beberapa saran yang membangun bagi pelaksanaan ekspor di Indonesia dalam menghadapi tantangan standardisasi mutu produk ekspor pasar internasional, yaitu sebagai berikut:

1. Tantangan oleh rezim perdagangan internasional harus dijawab oleh pemerintah dengan strategi yang sistematis dan melalui pertimbangan yang matang sebelum melakukan ratifikasi kebijakan internasional
2. Kontribusi ekspor oleh UKM di Indonesia yang masih tertinggal dengan negara Asia Tenggara lainnya harus mampu dijawab oleh pemerintah dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang mengedepankan UKM sebagai tiang penyangga perekonomian Indonesia dengan alokasi modal Negara dan modal asing yang tepat sasaran pada peningkatan kualitas produksi oleh UKM.

¹ istilah ini merujuk pada teori Dependency pada Mohtar Mas'oe'd, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, Jakarta; LP3ES

3. Kemampuan daya saing dalam menghadapi perdagangan internasional yang sejauh ini dicapai oleh Indonesia adalah didominasi oleh perusahaan besar yang berbasis investasi asing. Kondisi ini harus disadari oleh pemerintah Indonesia dan disikapi dengan regulasi ekonomi yang mendorong industri kerakyatan.
4. Prioritas pada alih teknologi akan mempercepat pencapaian produk Indonesia pada standar pasar internasional
5. Mengurangi ketergantungan utang luar negeri (ULN) dalam menggerakkan perekonomian domestik
6. *Global Governance Gaps* dalam regulasi ekonomi harus dikelola dan disikapi dengan strategi yang mengedepankan kepentingan rakyat daripada bergantung pada aktor asing